

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab IV dan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum dan khusus.

5.1.1. Simpulan Umum

Secara umum penelitian ini menghasilkan temuan makna dan temuan permasalahan. Berdasarkan hasil Temuan dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan nilai-nilai etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dibutuhkan dalam rangka penguatan karakter ASN sehingga terbentuk karakter kinerja dan karakter moral ASN yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* berdasarkan pendekatan integral (holistik). Hal tersebut untuk merespon isu dan fenomena kinerja pelayanan publik yang dinilai kurang efektif yang disebabkan kurangnya *responsiveness* ASN.

Nilai karakter yang perlu dikembangkan dalam pembinaan nilai etika ASN adalah *responsiveness*, transparansi, partisipasi masyarakat, dan demokrasi. Temuan maknanya adalah bahwa pembinaan nilai etika ASN untuk mewujudkan *Good Governance* merupakan implementasi nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan manusia utuh dengan menggunakan model pembinaan yang holistik dengan fokus pengayaan materi pada ekstensifikasi Peraturan Daerah tentang prinsip-prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Proses pembinaan nilai-nilai etika Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakekatnya adalah upaya implementasi nilai-nilai moral Pancasila untuk membentuk manusia seutuhnya melalui pengembangan potensi manusia utuh dengan dukungan kepemimpinan transformasional berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Model pembinaan nilai-nilai etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara holistik berdasarkan pendekatan *reinforcement*, *moral cognitive devolepment*, *sprititual development*, dan *social learning*.

5.1.2. Simpulan Khusus

1. Implementasi etika Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh DPM-PTSP Kota Bekasi dapat dikategorikan *baik*.
2. Nilai indikator kinerja ASN yang perlu ditingkatkan dalam proses pembinaan nilai-nilai etika ASN di kantor DPM-PTSP Kota Bekasi berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah nilai *kepekaan (responsiveness)*, *partisipasi*, *demokrasi* dan *transparansi*.
3. Nilai Karakter moral ASN yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan *Good Governance*: adalah karakter peduli/empati, kreatif/inovatif, disiplin, gotong royong/partisipasi, demokratis, jujur dan tanggungjawab.
4. Model pembinaan nilai etika Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bekasi untuk mewujudkan *Good Governance* berdasarkan perspektif holistik dilakukan secara integral.
5. Tujuan pembinaan nilai etika Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia utuh terutama melalui pengembangan makna *synnoetics* dan *ethics*, sebagai penguatan karakter moral dan karakter kinerja, agar terbentuk karakter moral otonom menuju kepribadian *ihsan (baik)*.

5.1.3. Dalil Berdasarkan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang pembinaan nilai-nilai etika Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, maka penelitian ini menghasilkan rumusan teori substantif sebagai berikut.

1. Pembinaan nilai-nilai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan *Good Governance* dalam perspektif Pendidikan Umum dan Karakter merupakan proses pendidikan nilai (karakter) ASN untuk mengembangkan potensi 6 makna (nilai), terutama makna *ethics* dan *synoethics*.
2. Pembinaan nilai-nilai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan *Good Governance* dipengaruhi oleh faktor internal (individu ASN,

kepemimpinan, dan sarana-prasarana) dan faktor eksternal (koordinasi dan partisipasi masyarakat).

3. Proses pembinaan nilai-nilai Etika Aparatur Sipil Negara di era Reformasi membutuhkan pendekatan integral dengan dukungan kepemimpinan *transformasional* yang visioner, inspiratif, aspiratif, responsif, demokratis, transparan dan memiliki spiritualisme tinggi, adil dan jujur.
4. Partisipasi masyarakat dalam penerapan *Electronic-Government* berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pencegahan terjadinya fenomena *bad governance*.
5. Model pembinaan nilai-nilai Etika Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan *Good Governance* secara integral, holistik dan berkesinambungan menjadi alternatif dalam memecahkan permasalahan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Makna pembinaan nilai-nilai Etika Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan *Good Governance* adalah upaya untuk membentuk manusia utuh yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (ES), dan kecerdasan spiritual (SQ), sehingga makin berkembangnya makna *empirics*, *symbolics*, *esthetics*, *synnoetics*, *ethics*, dan *synoptic*.
7. Pembinaan nilai-nilai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan *Good Governance* pada hakekatnya merupakan implementasi nilai-nilai dasar (*core values*) Pancasila untuk mewujudkan hakekat manusia utuh (*monopluralis*).

5.2. Implikasi Penelitian:

5.2.1. Implikasi bagi Bidang Ilmu Pendidikan Umum dan Karakter

Berdasarkan sintesis metodologi *Philosophis-Scientific (fenomenologi-hermeneutik)* hasil penelitian ini berimplikasi positif terhadap peranan Pendidikan Umum dan Karakter dalam merespon kebutuhan sinergitas disiplin ilmu- ilmu lain melalui mata kuliah Pembentuk Kepribadian/Mata Kuliah Umum (MKU), yaitu Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era

globalisasi yang berdampak pada perkembangan fenomena nilai yang makin kompleks.

5.2.2. Implikasi bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Perlunya perubahan paradigma kepemimpinan *transaksional* ke arah kepemimpinan *transformasional* yang *visioner, inovatif, transparansi, demokratis* dan *partisipatif*, serta memiliki *responsiveness* yang tinggi sesuai prinsip-prinsip *Good Governance* dalam rangka mengembangkan *responsiveness* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik .

5.2.3. Implikasi bagi Lembaga Hukum

Perlunya penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum bagi setiap warga negara, termasuk terhadap ASN untuk memperkuat karakter baik (*good character*) ASN dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*.

5.3. Rekomendasi

5.3.1. Rekomendasi bagi Bidang Ilmu Pendidikan Umum dan Karakter

Pentingnya pengkajian lebih lanjut tentang metode alternatif pembinaan nilai dan karakter yang efektif di lingkungan organisasi pemerintah untuk mengembangkan karakter moral dan karakter kinerja ASN dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sesuai visi –misi organisasi pemerintah era Reformasi.

5.3.2. Rekomendasi bagi Organisasi Pemerintah, khususnya DPM-PTSP Kota Bekasi dan Unit Pelayanan Publik lainnya.

1. Untuk mempertahankan prestasi dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan DPM-PTSP, pembinaan nilai etika ASN berbasis spiritualisme secara integral dan berkesinambungan perlu ditingkatkan intensitasnya untuk membentuk *moral otonom* ASN sehingga terbentuknya pribadi *Ihsan* ASN yang responsif, inovatif, kreatif, jujur dan adil.
2. Perlunya inovasi model pembinaan nilai etika ASN melalui DIKLAT CPNS dan BIMTEK bagi ASN untuk peningkatan *profesionalisme dan responsiveness* bagi aparatur pelayanan publik.

3. Perlunya pengembangan program sosialisasi dan ekstensifikasi peraturan dan Undang-Undang berkaitan dengan implementasi prinsip *Good Governance* di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan /non perijinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan visi-misi pemerintahan era Reformasi.

5.3.3. Rekomendasi bagi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Mempersiapkan Calon Tenaga Aparatur Pelayanan Publik

1. Diperlukan metode pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Etika ASN dan Etika Pemerintahan yang lebih kontekstual untuk membentuk karakter moral yang tinggi (*moral otonom /Tipe Moral B*) bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) yang jujur, amanah, bertanggungjawab, profesional dan peka/peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut melalui pendekatan integratif berkaitan dengan pendidikan karakter yang dapat membentuk karakter-moral otonom mahasiswa.